

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002)

Kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan (TNP2K, 2012).

Dr. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur dan H. Udin Hinggio sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara definitif pertama periode 2016-2021, mengimplemtasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kaltara melalui visi pertama yaitu mewujudkan Provinsi Kaltara yang Mandiri (tabel 3.1).

Tabel 3.1.
Visi, Misi Pertama, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 s/d 2021

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
Misi: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan PMKS
			2. Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi PMKS
			3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
		2. Peningkatan perluasan lapangan kerja	4. Memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja
		3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	5. Meningkatkan sistem peningkatan ketrampilan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan
			6. Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan dan industri



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	7. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
			8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan luar biasa
			9. Memperkuat pelaksanaan kurikulum, penerapan SPM dan mengembangkan manajemen pendidikan yang bebas gratifikasi
		5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	10. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
		6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan	11. Meningkatkan mutu perpustakaan daerah
		7. Pelestarian nilai-nilai budaya	12. Meningkatkan pelestarian dan pemahaman serta apresiasi sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi keragaman
		8. Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	13. Mengembangkan potensi pemuda pelopor pembangunan
			14. Meningkatkan mutu organisasi kepemudaan
			15. Meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta dalam memajukan bidang olahraga
			16. Meningkatkan mutu organisasi olahraga
	3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan	17. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
		10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	18. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
			19. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			20. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
			21. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
			22. Meningkatkan inovasi program pelayanan kesehatan di seluruh daerah terutama di daerah perbatasan dan terpencil
		11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana	23. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluarga ber-KB
			24. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
			25. Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga
	4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	26. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek pembangunan
			27. Meningkatkan perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak
	5. Meningkatnya pembangunan desa	13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu	28. Meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal
			29. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
			30. Mengembangkan wilayah transmigrasi yang produktif
			31. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	32. Meningkatkan jaringan irigasi
			33. Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian
			34. Mengembangkan teknologi pertanian
			35. Mengembangkan pola <i>integrated farming</i>
		15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	36. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani
			37. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pertanian
			38. Mengembangkan pemasaran produk pertanian
		16. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	39. Meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan pasca panen (<i>off-farm</i>)
			40. Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap
			41. Meningkatkan potensi dan budaya masyarakat pesisir
	17. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	42. Meningkatkan pembinaan dan fasilitas untuk pengawasan pesisir	
		43. Meningkatkan kualitas ODTW	
		44. Meningkatkan fungsi dan peran SDM dan kelembagaan kepariwisataan	
		45. Mengembangkan sistem informasi, pasar dan pariwisata yang terpadu	
		46. Meningkatnya informasi dan produksi pertambangan (batu bara dan sumber daya mineral)	
		47. Meningkatkan sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan	



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
			48. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertambangan
			49. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi pertambangan
		20. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	50. Mengembangkan hutan kemasyarakatan berbasis hasil hutan non kayu
			51. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari
			52. Meningkatkan industri pengolahan hasil hutan kayu/non kayu skala kecil dan besar
		21. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM	53. Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing
			54. Mewujudkan perdagangan lokal yang mendukung pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM
			55. Meningkatkan pengawasan peredaran produk layak jual dan memenuhi standar
		22. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	56. Memberdayakan usaha kecil
			57. Mewujudkan koperasi yang berkualitas
			58. Memberdayakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal
		23. Peningkatan daya tarik berinvestasi	59. Mengembangkan sistem perijinan yang cepat dan transparan.
	7. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	24. Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	60. Mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan
			61. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
			62. Mewujudkan penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau
		25. Pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	63. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara
		26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	64. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air baku
			65. Menyediakan sistem pengelolaan air minum dan air limbah
			66. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dasar permukiman
			67. Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat
			68. Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengaman abrasi pantai
			69. Meningkatkan penyediaan sumber daya energi dan menggiatkan sumber energi baru terbarukan
	8. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	27. Peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara	70. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi
			71. Meningkatkan sarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan
			72. Meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi massal
		28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	73. Meningkatkan pelayanan jasa dan jaringan komunikasi dan informatika
	9. Meningkatnya kualitas	29. Peningkatan perlindungan dan	74. Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan,



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
	lingkungan hidup	pelestarian lingkungan hidup	perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup
			75. Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan

Sumber: Draf Akhir Revisi RPJMD Prov. Kaltara 2016-2021.

3.1. Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

Sejak Dr. H. Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI sebagai Pj. Gubernur pada tanggal 22 April 2013 di Jakarta sebagai konsekuensi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara sebagai simbol Bergeraknya roda pemerintahan Provinsi Kaltara menuju lebih baik dari sebelum mekar dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi induk. Sehubungan hal tersebut, belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang secara implisit mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi tidak berarti percepatan penanggulangan kemiskinan tidak menjadi prioritas utama pembangunan di Kaltara, bahkan spirit terbentuknya provinsi termuda ke-34 di Indonesia adalah percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk Kaltara.

Walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru berusia \pm 4,8 tahun pada Desember 2017 ini, telah menunjukkan eksistensinya yaitu telah pembangunan dan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas daerah diantaranya jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, pelabuhan umum, bandara perintis dan bandara internasional. Kegiatan pembangunan bukan hanya dilakukan di ibukota provinsi atau kabupaten tetapi lebih diprioritaskan untuk membangun di daerah perbatasan, pedalaman dan perdesaan yang sebelumnya sulit diakses kini sudah mulai teratasi, walaupun masih banyak permasalahan yang belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kaltara beserta seluruh stakeholder dan komponen masyarakat di daerah ini.

3.2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Walaupun Dokumen RPJMD Provinsi Kaltara 2016-2021, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kaltara 2016-2021 terlebih dokumen khusus untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Provinsi Kaltara 2016-2021 sudah disusun, ternyata didalam uraian objek DPA masing-masing Perangkat Daerah belum optimal menunjukkan keberpihakan kepada percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terlebih Fakir Miskin (FK) di Kaltara.

Kendati demikian, tidak berarti Pemerintah Provinsi Kaltara tidak mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada prinsipnya seluruh program dan kegiatan yang laksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi Kaltara bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama pada kategori desil I (pertama), yaitu 10% MBR. Dari 10% MBR tersebut terdapat 7,22% penduduk miskin di Kaltara per Maret 2017. Oleh sebab itu, jika dipilah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama seluruh komponen dapat dikategorikan berdasarkan bersentuhan langsung dan atau tidak bersentuhan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan MBR tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD baik dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltara maupun dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017.

Berdasarkan hasil analisis terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2016-2017, maka diperoleh Program dan Kegiatan yang berhubungan langsung terhadap penanggulangan kemiskinan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terlebih untuk desil I (pertama) sebagaimana dijelaskan pada table 3.2. dan 3.3.

Tabel 3.2.
Analisis Keterkaitan Program, Kegiatan, dan Anggaran (Rp) Tahun 2016 Menurut SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Yang Bersentuhan Langsung Dengan Penanggulangan Kemiskinan

No	SKPD	Program dan Kegiatan	Anggaran(Rp)	Total Anggaran PD (Rp)	%	Target	Satuan
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (19 Program, 85 Kegiatan)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5.318.700.000,00	67.413.497.763,00	7,89		
		Kegiatan Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas	2.318.700.000,00		3,44		
2	Dinas Kesehatan (16 Program, 50 Kegiatan)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.523.541.000,00	34.581.301.104,00	14,26		
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya	215.141.000,00		0,62		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.865.650.000,00		5,39		
		Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	450.000.000,00		1,30		



		Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	852.000.000,00		2,46		
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	469.100.000,00		1,36		
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	541.430.000,00		1,57		
		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu	221.610.000,00		0,64		
		Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu	319.820.000,00		0,92		
3	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (11 Program, 35 Kegiatan)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	250.000.000,00	16.279.151.358,00	12,00		
		Kegiatan Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	250.000.000,00		1,54	80,00	org
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1.704.169.516,00		10,47	50,00	org
		Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	137.375.000,00		0,84	15,00	SP
		Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	65.244.516,00		0,40	40,00	org

Sumber: Kumpulan DPA Perangkat Daerah TA. 2016.

Tabel 3.3.
Analisis Keterkaitan Program, Kegiatan, dan Anggaran (Rp) Tahun 2017 Menurut SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Yang Bersentuhan Langsung Dengan Penanggulangan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Total Anggaran PD	%	Target	Satuan
1	Dinas Kesehatan (14 Program, 47 Kegiatan)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.570.479.500,00	45.018.287.271,00	14,80		
		Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1.996.079.500,00		4,43		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.677.620.000,00		3,73		
		Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	590.000.000,00		1,31		
		Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang	526.660.000,00		1,17		



		Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya					
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	354.600.000,00		0,79		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskn	1.068.000.000,00			4,00	kab
		Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak	693.000.000,00				
		Kegiatan Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	375.000.000,00				
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.413.720.000,00		3,14		
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	1.130.000.000,00		2,51		
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu	283.720.000,00		0,63		
2	Dinas Sosial (8 Program, 28 Kegiatan)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	656.700.000,00	12.669.495.261,00	7,55	1,00	paket
		Kegiatan Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	511.000.000,00		4,03	1,00	paket
		Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	14.570.000,00		0,12	1,00	paket
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.847.750.000,00		14,58		
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1.096.550.000,00		8,66	135,00	PMKS
		Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	751.200.000,00		5,93	183,00	tagana
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	407.590.000,00		3,22	150,00	org
		Kegiatan Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat	407.590.000,00		3,22	150,00	org
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	300.000.000,00		2,37	1,00	panti
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo	300.000.000,00		2,37	15,00	SP



3	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu (6 Program, 20 Kegiatan)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.310.900.000,00	3.659.215.000,00	41,88	40,00	org
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1.310.900.000,00		35,82	40,00	org
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	129.800.000,00			40,00	org
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	129.800.000,00			40,00	org
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (9 Program, 29 Kegiatan)	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	925.700.000,00	8.562.348.781,00	22,05	1,00	paket
		Kegiatan Pembinaan Mental Spritual	143.000.000,00		1,67	50,00	org
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	934.500.000,00				
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	589.500.000,00			16,00	org
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	221.400.000,00				
		Kegiatan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	221.400.000,00			90,00	org
		Program Transmigrasi Lokal	102.300.000,00			30,00	Org
		Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal	102.300.000,00			30,00	org
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (6 Program, 21 Program)	Program Keluarga Berencana	961.923.500,00	11.577.431.322,00	#REF!	1,00	paket
		Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	961.923.500,00		8,31	50,00	org
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2.389.089.000,00				
		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	1.222.247.500,00				
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	116.841.500,00				



	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	813.371.500,00			40,00	org
	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	813.371.500,00			40,00	org

Sumber: Kumpulan DPA Perangkat Daerah TA. 2017.

Selain program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini beberapa program dan kegiatan yang juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kaltara tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh SPKD terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Program Subsidi Ongkos Angkut Orang.
Program ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara yang bertujuan untuk meringankan biaya ongkos angkut melalui pesawat perintis bagi penduduk yang berdomisili di daerah pedalaman dan perbatasan negara yang belum bisa dan atau sulit diakses melalui transportasi darat.
2. Program Subsidi Ongkos Angkut Barang
Program ini dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara yang bertujuan untuk meringankan biaya ongkos angkut barang melalui pesawat perintis bagi penduduk yang berdomisili di pedalaman dan perbatasan Negara yang belum bisa dan atau sulit diakses melalui transportasi darat.
3. Program Sambungan SR Air Minum.
Program ini diutamakan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dengan target 2.000 unit pemasangan baru. Untuk tahun 2017 diprioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Bulungan, pendanaannya berasal dari APBN tahun anggaran 2017. Program ini dilaksanakan oleh Perusda PDAM Kabupaten Bulungan bekerjasama dengan instansi teknis lainnya.
4. Program Listrik Desa.
Program ini merupakan program nasional, sementara Pemerintah Provinsi untuk saat ini hanya memfasilitasi dan mendorong agar terjadi percepatan implementasi rasio elektrisitas di Kaltara khususnya di daerah ibukota kecamatan di Provinsi Kaltara.
5. Program Tunjangan Insentif Bagi Guru.
Program ini bertujuan agar seluruh guru-guru di Kaltara lebih meningkatkan pengabdian dan profesionalismenya untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap para siswanya, baik guru PNS maupun non PNS baik yang mengajar

diibukota provinsi. Ibukota kabupaten/kota terlebih bagi guru yang mengajar yang didaerah pedalaman, tertinggal dan perbatasan Negara. Dengan kebijakan ini ternyata efektivitas dan relevansi pelayanan kependidikan meningkat, bahkan sangat membantu bagi guru-guru yang belum diangkat menjadi PNS dalam hal kesejahteraannya. Kebijakan ini perlu dikaji ulang, seyogyanya insentif diberikan lebih profesional dan berkeadilan. Untuk diketahui insentif saat ini diberikan sebesar Rp.500.000/guru/bulan.

6. Program Guru Garis Depan Tingkat Pendidikan Menengah.

Program ini bertujuan untuk melayani pendidikan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau dan tidak memiliki guru PNS dengan merekrut CPNS guru pendidikan vokasi dan umum sebanyak 40 orang yang disebar merata hingga ke pelosok perbatasan dan pulau terpencil pada bulan Oktober 2017 (gambar 3.1).

Gambar 3.1
40 Alokasi Formasi Guru Garis Depan (GGD) untuk Kaltara Tahun 2017

MATA PELAJARAN ALOKASI FORMASI		
Bahasa Indonesia 5	Matematika 4	PLN 2
SMAN 1 Pulau Bunyu	SMAN 2 Malinau	SMKN 1 Sei Manggaris
SMAN 13 Malinau	SMAN 6 Malinau	SMKN 1 Pulau Bunyu
SMAN 14 Malinau	SMKN 1 Sei Manggaris	Sejarah 2
SMKN 1 Pulau Bunyu	SMKN 1 Krayan	SMAN 1 Lumbis
SMKN 1 Sei Manggaris	Kimia 1	SMAN 1 Pulau Bunyu
Bahasa Inggris 6	SMAN 9 Malinau	Geografi 1
SMAN 11 Malinau	Fisika 2	SMAN 2 Malinau
SMKN 1 Sei Manggaris	SMAN 1 Pulau Bunyu	Ekonomi 1
SMKN 1 Tulin Onsoi	SMAN 2 Malinau	SMAN 1 Lumbis
SMKN 1 Sebatik Barat	Biologi 1	Akuntansi 2
SMKN 1 Krayan	SMAN 10 Malinau	SMKN 1 Krayan
SMKN 1 Pulau Bunyu	IPS 4	SMKN 1 Sebatik Barat
Bimbingan Konseling 3	SMKN 1 Malinau	PJOK 2
SMAN 2 Malinau	SMKN 2 Malinau	SMKN 1 Sei Manggaris
SMAN 1 Krayan Selatan	SMK SPP Malinau	SMKN 1 Pulau Bunyu
SMKN 1 Sei Manggaris	SMKN 1 Sei Manggaris	TIK 2
	SMKN 1 Krayan	SMAN 2 Malinau
	SMKN 1 Pulau Bunyu	SMAN 7 Malinau

Sumber: BKD Prov.Kaltara, 2017

7. Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Program ini menjadi program prioritas dan unggulan Pemerintah Provinsi Kaltara, karena locus untuk rencana pembangunan program PLTA ini terletak di wilayah perdesaan yang berada di pedalaman, tertinggal, dan perbatasan Negara yang menjadi salah satu implementasi Nawacita Presiden H.Joko Widodo dan Wakil Presiden H.M.Jusuf Kalla yang akan segera diwujudkan. Adapun potensi DAS yang akan dikembangkan yaitu di Sungai Kayan Kabupaten Bulungan, di Sungai Mentarang Kabupaten Malinau dan di Sungai Sembakung Kabupaten Nunukan. Di targetkan di awal tahun 2018 pembangunan konstruksi PLTA tahap I (pertama) akan dilaksanakan oleh kontraktor untuk di Sungai Kayan Kecamatan

Peso Kabupaten Bulungan dan sebagian sungainya khususnya di lokus hulu sungai berbatasan langsung dengan DAS Kabupaten Malinau (Gambar 3.2).

Gambar 3.2.

Pj. Gubernur Kalimantan Utara Dr.H. Irianto Lambrie Di dampingi Bupati Bulungan Drs.H. Budiman Arifin, M.Si Menandatangani Mou Rencana Pembangunan PLTA Peso pada 18 Januari 2014 di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan sebagai Tanda Akan Dimulainya Pembangunan PLTA oleh PT. Kayan Hydro Energy.



8. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara (tabel 3.4 dan tabel 3.5).

Tabel 3.4.

Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Kalimantan Utara Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Dana APBN Tahun 2017

Lokasi	Jumlah (unit)	Besaran Dana Bantuan
1. KAB.BULUNGAN	423	Rp.6,015,000,000
1. KEC SEKATAK	127	Rp.1,650,000,000
1). Pentian	40	Rp. 525,000,000
2). Pungit	47	Rp. 600,000,000
3).Sekatak Bengara	40	Rp. 525,000,000
2. KEC TANJUNG PALAS TIMUR	208	Rp. 3,060,000,000
1). Sajau Hilir	44	Rp. 660,000,000
2). Mangku Padi	55	Rp. 805,000,000
3). Binai	53	Rp. 775,000,000
4). Pura Sajau	56	Rp. 820,000,000
3. KEC TANJUNG SELOR	88	Rp. 1,305,000,000



1). Tanjung Selor Hulu	38	Rp. 555,000,000
2). Tanjung Selor Timur	50	Rp. 750,000,000
2. KOTA TARAKAN	206	Rp. 2,805,000,000
1. KEC TARAKAN TENGAH	88	Rp. 1,155,000,000
1). Sebengkok	51	Rp. 630,000,000
2). Kampung Satu/SKIP	37	Rp. 525,000,000
2. KEC TARAKAN TIMUR	64	Rp. 900,000,000
1). Pantai Amal	64	Rp. 900,000,000
3. KEC. TARAKAN UTARA	54	Rp. 750,000,000
1). Juata Kerikil	54	Rp. 750,000,000
3. KAB MALINAU	240	Rp. 3,355,000,000
1. KEC MALINAU SELATAN HULU	70	Rp. 1,050,000,000
1). Nahakramo	35	Rp. 525,000,000
2). Punan Mirau	35	Rp. 525,000,000
2. KEC MALINAU	46	Rp. 690,000,000
1). Malinau Hulu	46	Rp. 690,000,000
3. KEC MALINAU KOTA	124	Rp. 1,615,000,000
1). Malinau Sebrang	89	Rp. 1,090,000,000
2). Pelita Kanaan	35	Rp. 525,000,000
4. KAB NUNUKAN	705	Rp. 10,015,000,000
1. KEC LUMBIS	205	Rp. 2,985,000,000
1). Mansalong	41	Rp. 525,000,000
2). Nainsid	41	Rp. 615,000,000
3). Tanjung Hulu	43	Rp. 645,000,000
4). Tubus	45	Rp. 675,000,000
5). Sapuan	35	Rp. 525,000,000
2. KEC NUNUKAN SELATAN	199	Rp. 2,840,000,000
1). Mansapa	43	Rp. 625,000,000
2). Nunukan Selatan	56	Rp. 770,000,000
3). Selisun	39	Rp. 560,000,000
4). Tanjung Harapan	61	Rp. 885,000,000
3. KEC SEBATIK TENGAH	135	Rp. 1,980,000,000
1). Bukit Harapan	43	Rp. 600,000,000
2). Sungai Limau	92	Rp. 1,380,000,000
4. KEC NUNUKAN	166	Rp. 2,210,000,000
1). Binusan	87	Rp. 1,215,000,000
2). Nunukan Timur	68	Rp. 845,000,000

3). Nunukan Utara	11	Rp. 150,000,000
TOTAL	1.574	Rp. 22.190.000.000

Sumber: SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara, 2017

Tabel 3.5.

Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Kalimantan Utara Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017

Lokasi			Jumlah (unit)	Besaran Dana Bantuan
Tarakan (60)	1. Tarakan Timur	Gunung Lingkas	27	Rp. 390.000.000
	2. Tarakan Barat	Karang Harapan	28	Rp. 430.000.000
Bulungan (200)	1. Tanjung Palas Utara	Ruhui Rahayu	18	Rp. 235.000.000
		Kelubir	4	Rp. 50.000.000
		Panca Agung	6	Rp. 70.000.000
	2. Tg. Palas Timur	Wonomulyo	42	Rp. 615.000.000
		Tanah Kuning	8	Rp. 120.000.000
	3. Tanjung Palas	Karang Anyar	5	Rp. 62.500.000
	4. Tanjung Selor	Tg. Selor Hilir	35	Rp. 455.000.000
		Jelarai	68	Rp. 960.000.000
Tana Tidung	1. Sesayap Hilir	Sesayap	32	Rp. 450.000.000
		Sepala Dalung	31	Rp. 450.000.000
TOTAL			305	Rp. 4.152.620

Sumber: Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara, 2017

3.3. Evaluasi APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

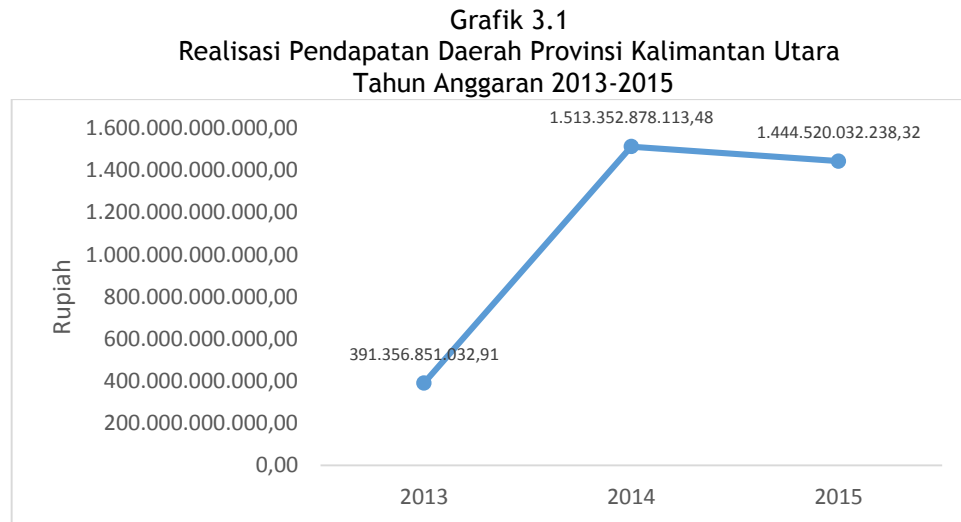
Keberprihatinan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltara dapat dilihat dari kebijakan alokasi anggaran APBD untuk penanggulangan kemiskinan di Kaltara. Analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan evaluasi terhadap 2 bagian, yaitu pendapatan dan belanja, bertujuan untuk menilai sejauh mana relevansi dan efektifitas APBD dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Kriteria analisis ini pada prinsipnya mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan, prioritas intervensi dan wilayah, dan rumah tangga atau individu penerima manfaat program, serta standar biaya pelayanan publik.

Secara sederhana, APBD yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditentukan untuk penanggulangan kemiskinan serta standar pelayanan publik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 telah menggaris bawahi empat strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta memperkuat sinergi kebijakan.

3.2.1. Analisis Pendapatan Daerah

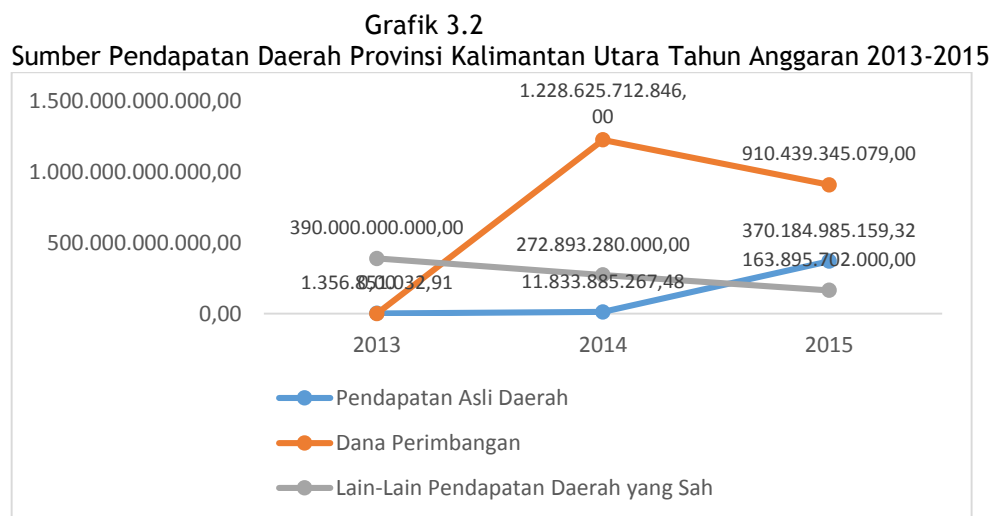
Sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pendapatan daerah Provinsi Kaltara tergolong belum stabil terutama pada

tahun 2013 akan tetapi trendnya cenderung naik ditahun 2014, namun ditahun 2015 turun (grafik 3.1).



Sumber: draf Akhir Revisi RPJMD Prov.Kaltara 2016-2021, 2017

Trend perkembangan jenis-jenis sumber pendapatan daerah Provinsi Kaltara menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda dan memiliki kecenderungan meningkat positif meskipun belum sepenuhnya stabil (grafik 3.2).



Sumber: draf Akhir Revisi RPJMD Prov.Kaltara 2016-2021, 2017

Trend rerata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2013-2016 untuk berbagai jenis pendapatan ada yang bernilai positif meskipun belum sepenuhnya stabil dan juga bernilai negatif (tabel 3.6).



Tabel 3.6.
 Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
 Tahun Anggaran 2013 s/d 2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	Rerata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN	391,356,851,033	1,513,352,878,113	1,444,520,032,238	2,332,986,748,692	114.6
1,1,	Pendapatan Asli Daerah	1,356,851,033	11,833,885,267	370,184,985,159	507,955,516,972	1279.2
1,1,1,	Pajak daerah	-	-	305,686,568,264	249,930,125,019	-18.2
1,1,2,	Retribusi daerah	-	-	142,065,600	129,871,200	-8.6
1,1,3,	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
1,1,4,	Lain-lain PAD yang sah	1,356,851,033	11,833,885,267	64,356,351,295	257,895,520,753	505.6
1,2,	Dana Perimbangan	-	1,228,625,712,846	910,439,345,079	1,579,537,873,785	23.8
1,2,1,	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	-	1,199,836,456,846	199,244,097,079	169,483,900,727	-49.2
1,2,2,	Dana alokasi umum	-	20,567,986,000	651,247,428,000	1,032,459,159,000	1562.4
1,2,3,	Dana alokasi khusus	-	8,221,270,000	59,947,820,000	377,594,814,058	579.5
1,3,	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	390,000,000,000	272,893,280,000	163,895,702,000	245,493,357,935	-6.7
1,3,1	Hibah	390,000,000,000	200,000,000,000	71,538,702,000	1,103,255,000	-70.5
1,3,2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1,3,3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	-	-	-	-	-
1,3,4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	-	72,893,280,000	92,331,430,000	5,000,000,000	-34.0
1,3,5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1,3,6	Pendapatan Lainnya	-	-	25,570,000	239,390,102,935	936114.7

Sumber: draf Akhir Revisi RPJMD Prov.Kaltara 2016-2021, 2017

3.2.2. Analisis Belanja Daerah

Trend proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja tahun anggaran 2013-2016 Provinsi Kalimantan Utara cenderung naik, baik belanja tidak

langsung maupun belanja langsung. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja hibah dan kenaikan signifikan pada realisasi belanja pegawai (tabel 3.7).

Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 s/d 2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
A	Belanja Tidak Langsung	6,309,831,000	141,231,908,498	792,020,755,314	996,711,497,019
1	Belanja Pegawai	6,309,831,000	46,206,963,498	109,938,425,365	181,900,063,112
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	11,795,977,508
4	Belanja Hibah	-	94,624,945,000	248,342,542,746	203,188,143,764
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	2,400,000,000
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	83,619,643,705	188,852,025,295
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
8	Belanja Tidak Terduga	-	400,000,000	500,000,000	221,618,000
9	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	83,619,643,705	188,852,025,295
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	266,010,999,792	408,353,669,339
B	Belanja Langsung	71,585,618,584	501,133,395,549	1,185,190,026,898	1,559,822,219,378
1	Belanja Pegawai	5,897,172,600	35,906,166,100	92,731,228,875	112,104,382,395
2	Belanja Barang dan Jasa	33,086,715,719	240,588,071,819	423,849,112,920	650,435,580,534
3	Belanja Modal	32,601,730,265	224,639,157,630	668,609,685,103	797,282,256,449
	Total Belanja	77,895,449,584	642,365,304,047	1,977,210,782,212	2,556,533,716,397

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2017

Trend realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2013-2016 di Provinsi Kaltara cenderung naik (tabel 3.8).

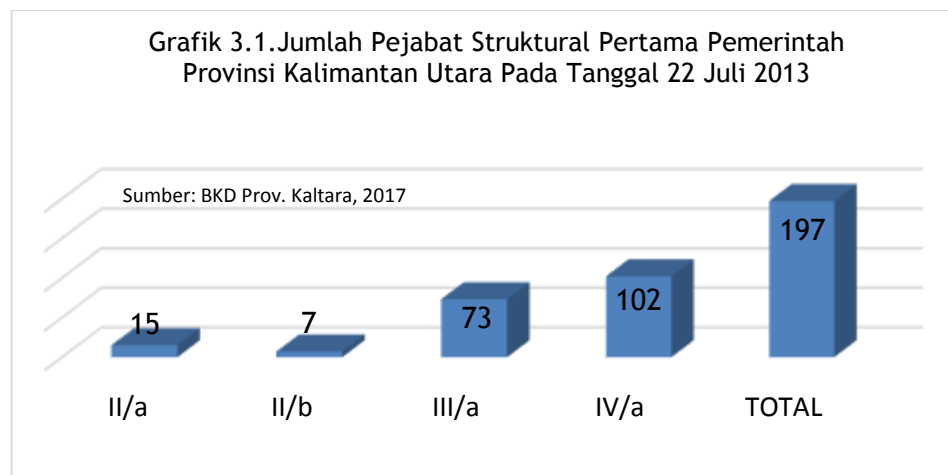
Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 s/d 2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
A	Belanja Tidak Langsung	6,309,831,000	46,206,963,498	109,938,425,365	181,900,063,112
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	610,831,000	14,406,719,294	48,689,826,624	85,887,013,289
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	5,549,000,000	31,650,244,204	52,427,103,132	83,784,724,440
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	150,000,000	150,000,000	3,090,966,100	4,725,996,333
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)			5,730,529,509	7,502,329,051
B	Belanja Langsung	40,321,242,998	221,862,591,520	284,384,321,883	361,952,970,283
1	Belanja Honorarium PNS**)	5,378,050,000	28,232,072,500	67,972,772,250	73,260,905,520
13	Belanja Honorarium Non PNS	519,122,600	7,336,255,000	20,820,010,625	27,069,226,875

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	82,400,000.00	811,410,000
4	Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	1,822,340,142	4,710,582,576	10,782,096,126	11,056,301,044
5	Belanja premi asuransi kesehatan	-	-	-	905,934,366
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	-	334,015,100	394,490,300	226,682,000
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	614,907,700.00	805,908,900.00	3,330,802,210	942,729,885
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	17,479,000.00	985,504,336	2,439,730,400	2,400,419,790
9	Belanja perjalanan dinas**)	17,924,277,179.00	92,214,794,757	114,931,567,769	179,685,087,532
	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	-	-	202,500,000	231,250,000
12	Belanja Modal (Kantor. Mobil Dinas. Meubelair. peralatan dan perlengkapan dll)	32,601,730,256	88,049,367,251	63,510,352,203	65,363,023,271
	TOTAL	46,631,073,998	268,069,555,018	394,322,747,248	543,853,033,395

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Dr. H. Irianto Lambrie selaku Pj. Gubernur Kaltara pertama melantik para Pejabat Struktural (Eselon II, III, IV) pada tanggal 22 Juli 2013 di Lapangan Agatis Tanjung Selor sebagai tanda awal efektifnya roda Pemerintahan Provinsi Kaltara (grafik 3.3 dan gambar 3.3).





Gambar 3.3.

Pj. Gubernur Kalimantan Utara Dr.H. Irianto Lambrie Memperhatikan Penandatanganan Perjanjian Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II.a Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pejabat Struktural Pertama Yang Dilantik Pada Tanggal 22 Juli 2013 Di Tanjung Selor.

Untuk mendukung roda pemerintah provinsi, maka disusunlah Renja, RKA dan DPA yang mempedomani RPJMD Prov. Kaltim atau lebih dikenal dengan istilah RPJMD Mini yang berlaku efektif pada bulan September 2013 setelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Sehubungan hal dimaksud, maka dapat diketahui realisasi keuangan tahun anggaran 2013 sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 terserap hanya sebesar 33,42% dari total anggaran sebesar Rp.233.103.606.219. Realisasi keuangan tertinggi diserap oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu 82,04% sedangkan terendah diserap oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga hanya sebesar 12,49% (tabel 3.9).

Tabel 3.9

Realisasi Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO)	16.810.836.849,00	7,21	2.099.449.583,60	12,49
2	Dinas Kesehatan, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKPPKB)	3.628.230.000,00	1,56	1.643.666.214,00	45,30
3	Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	7.891.550.000,00	3,39	3.829.573.035,00	48,53
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	4.337.000.000,00	1,86	2.230.776.717,00	51,44



5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DHKI)	3.547.500.500,00	1,52	1.719.621.828,00	48,47
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DSTKT)	2.561.340.880,00	1,10	1.187.068.362,00	46,35
7	Badan Kesatuan Politik dan Penanggulangan Bencana (BKPPB)	3.608.130.000,00	1,55	1.468.391.742,00	40,70
8	Kepala Daerah & Wakil	235.500.000,00	0,10	193.200.000,00	82,04
9	Sekretariat Daerah	174.434.894.940,00	74,83	55.930.253.679,60	32,06
10	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	3.144.290.000,00	1,35	1.036.031.225,00	32,95
11	Inspektorat	3.654.998.050,00	1,57	1.440.668.830,00	39,42
12	Badan Pengelola Kawasan Pedesaan dan Daerah Tertinggal (BPKPDT)	2.715.010.000,00	1,16	1.736.311.500,00	63,95
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan (DPK)	3.416.325.000,00	1,47	2.655.238.167,00	77,72
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM)	3.118.000.000,00	1,34	724.925.221,00	23,25
Jumlah		233.103.606.219,00	100,00	77.895.176.104,20	33,42

Sumber: Bappeda Prov.Kaltara, 2013

Pada tahun 2014, Pj. Gubernur Kaltara memekarkan Perangkat Daerah dari 14 PD menjadi 23 PD diikuti kenaikan anggaran dari Rp.233.103.606.219 ditahun 2013 menjadi Rp.2.050.026.758.025,31 ditahun 2014, tetapi tidak diikuti kenaikan realisasi keuangan atau turun -2,09% dari 33,42% ditahun 2013 sehingga menjadi 31,33% ditahun 2014. Realisasi keuangan tertinggi diserap oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 88,73% sedangkan terendah diserap oleh DPRD 0% karena anggota DPRD Provinsi Kaltara, waktu itu masih bergabung dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan. Walaupun belum terbentuk, Pemerintah Provinsi Kaltara tetap mengalokasikan anggaran dalam rangka persiapan apabila dibentuknya DPRD Provinsi Kaltara ditahun 2014. Selain itu DPRD, Badan Pengelolaan Perbatasan tergolong daya serap realisasi keuangannya rendah yaitu hanya sebesar 21,81% (tabel 3.10).

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO)	55.008.419.099,00	2,68	13.437.428.596,00	24,43
2	Dinas Kesehatan (DK)	34.548.188.325,00	1,69	21.502.937.448,00	62,24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR)	256.393.565.466,00	12,51	115.906.460.941,00	45,21
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	50.651.348.622,75	2,47	23.446.185.819,00	46,29
5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DHKI)	41.454.790.818,00	2,02	19.387.760.847,00	46,77
6	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	13.181.034.506,90	0,64	5.707.512.132,00	43,30
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD)	8.463.309.306,90	0,41	4.452.814.277,00	52,61



8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DSTKT)	18.895.761.151,00	0,92	5.885.376.827,00	31,15
9	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT)	18.905.108.010,00	0,92	5.050.450.343,00	26,71
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP)	35.035.079.325,00	1,71	10.219.116.041,00	29,17
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Ksatpol PP)	12.092.628.206,90	0,59	5.520.968.900,00	45,66
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	11.351.787.995,00	0,55	5.792.504.562,00	51,03
13	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2.921.500.000,00	0,14	-	-
14	Kepala Daerah & Wakil	229.920.000,00	0,01	204.000.000,00	88,73
15	Sekretariat Daerah	1.320.640.296.336,96	64,42	338.051.335.500,00	25,60
16	Sekretariat DPRD	30.748.459.979,00	1,50	8.849.729.748,00	28,78
17	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	11.941.787.500,00	0,58	4.934.366.587,00	41,32
18	Inspektorat	12.489.727.126,00	0,61	6.564.334.396,00	52,56
19	Badan Pengelola Perbatasan (BPP)	44.048.908.582,00	2,15	9.607.018.363,00	21,81
20	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DPKKP)	29.198.920.273,00	1,42	20.698.670.345,00	70,89
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)	11.253.514.100,00	0,55	2.831.176.433,00	25,16
22	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	12.566.666.006,90	0,61	6.078.779.293,00	48,37
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM)	18.006.037.289,00	0,88	8.236.376.649,00	45,74
Jumlah		2.050.026.758.025,31	100,00	642.365.304.047,00	31,33

Sumber: Bappeda Prov. Kaltara, 2014

Trend anggaran tahun 2015 naik dibanding anggaran tahun 2014 sebesar Rp.649.395.624.487,48 (31,68%) dari Rp.2.050.026.758.025,31 ditahun 2014 sehingga menjadi Rp.2.699.422.382.512,79 ditahun 2015. Kenaikan anggaran diikuti kenaikan realisasi keuangan sebesar 38,81% dari 31,33% ditahun 2014 sehingga menjadi 70,14% ditahun 2015. Realisasi keuangan tertinggi diserap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 82,70% sedangkan terendah diserap oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 36,06% (tabel 3.11).

Tabel 3.11
Realisasi Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015

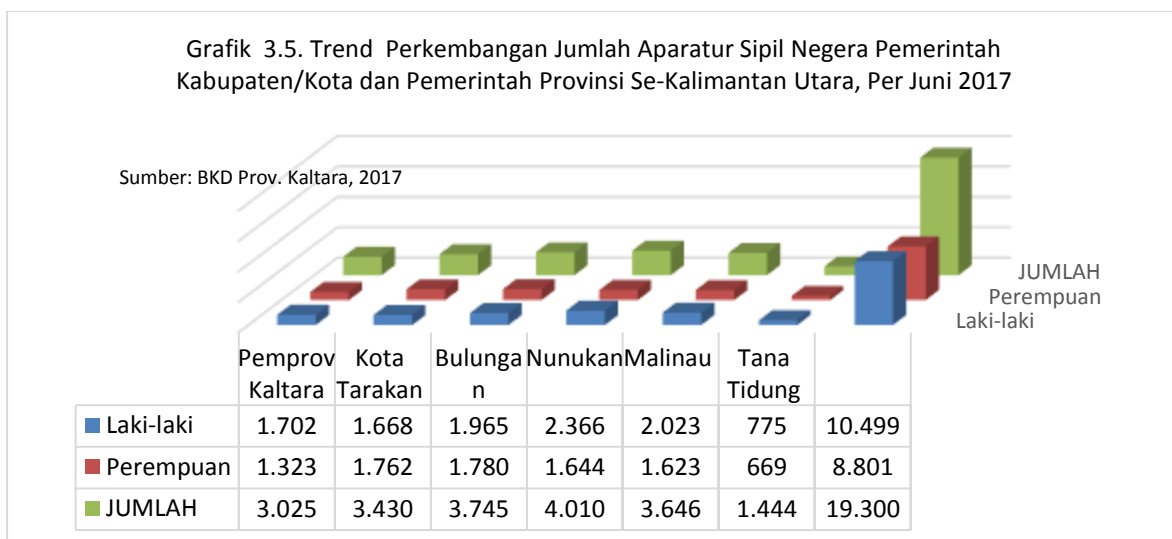
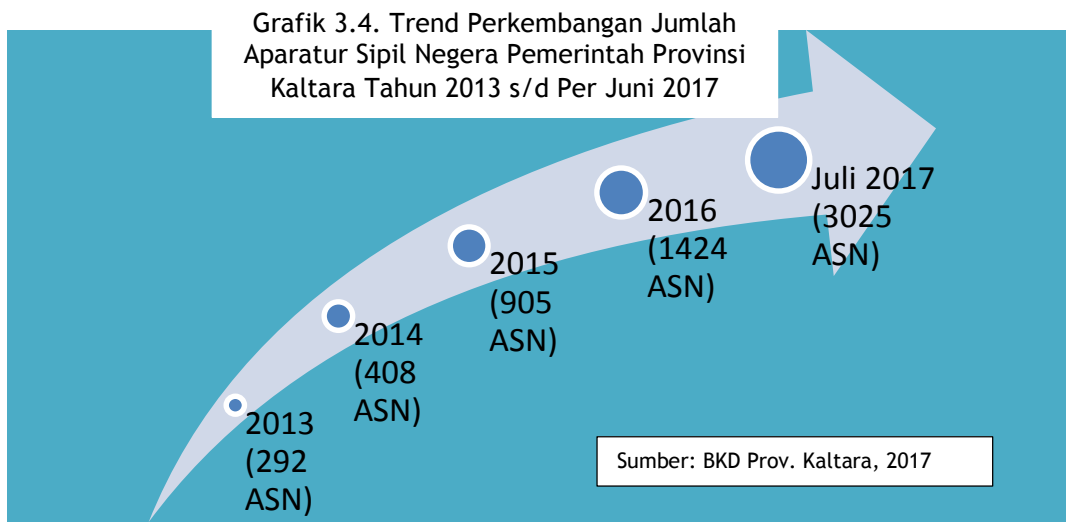
No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO)	80.193.882.281,08	2,97	33.665.252.551,00	41,98
2	Dinas Kesehatan (DK)	43.170.868.758,72	1,60	25.053.032.881,00	58,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR)	771.372.909.761,80	28,58	637.919.317.727,18	82,70
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	45.592.518.858,72	1,69	24.514.881.152,00	53,77
5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DHKI)	69.389.575.858,72	2,57	44.539.729.452,00	64,19
6	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	19.624.516.139,00	0,73	12.386.867.533,00	63,12



7	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BMPPKBP)	24.670.352.179,56	0,91	17.879.699.624,00	72,47
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DSTKT)	27.096.670.889,72	1,00	11.998.747.951,00	44,28
9	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT)	24.200.702.163,17	0,90	13.691.721.991,00	56,58
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP)	28.210.462.808,72	1,05	12.508.717.905,00	44,34
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Ksatpol PP)	46.528.952.163,17	1,72	16.777.261.195,00	36,06
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	19.200.702.163,17	0,71	11.005.446.800,99	57,32
13	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	13.346.341.860,00	0,49	10.503.489.854,00	78,70
14	Kepala Daerah & Wakil	1.669.019.485,00	0,06	644.663.000,00	38,63
15	Sekretariat Daerah	1.200.766.234.585,64	44,48	860.203.353.708,55	71,64
16	Sekretariat DPRD	74.884.340.052,18	2,77	39.836.691.427,00	53,20
17	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	57.568.750.550,65	2,13	30.440.251.598,00	52,88
18	Inspektorat	18.387.173.625,99	0,68	9.843.362.646,00	53,53
19	Badan Pengelola Perbatasan (BPP)	35.565.523.618,72	1,32	17.265.856.118,00	48,55
20	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DPKPP)	29.905.529.831,00	1,11	18.898.009.404,00	63,19
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)	19.200.702.163,17	0,71	9.223.304.176,00	48,04
22	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	25.614.443.163,17	0,95	20.744.944.385,00	80,99
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM)	23.262.209.551,72	0,86	13.872.268.908,00	59,63
Jumlah		2.699.422.382.512,79	100,00	1.893.416.871.987,72	70,14

Sumber: Ekobang Setddaprov.Kaltara, 2015

Trend anggaran tahun 2016 naik dibanding anggaran tahun 2015 sebesar Rp.201.947.186.689,33 (7,48%) dari Rp.2.699.422.382.512,79 ditahun 2015 sehingga menjadi Rp.2.901.369.569.202,12 ditahun 2016. Kenaikan anggaran anggaran diikuti kenaikan realisasi keuangan sebesar 16,83% dari 70,14% ditahun 2015 sehingga menjadi 86,97% ditahun 2016. Realisasi keuangan tertinggi diserap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu 96,80% sedangkan terendah diserap oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan hanya sebesar 32,04% (tabel 3.12). Tingginya realisasi keuangan salah satu faktornya adalah telah ditetapkan RPJMD Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2016-2021 dan bertambahnya Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi sementara ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltara jumlahnya cenderung turun salah satu faktornya adalah akibat defisit anggaran di Kabupaten/Kota (grafik 3.4 dan grafik 3.5).



Tabel 3.12
Realisasi Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO)	61.163.196.548,00	2,11	44.794.107.341,00	73,24
2	Dinas Kesehatan (DK)	27.026.404.804,00	0,93	20.178.771.690,00	74,66
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR)	805.291.512.903,00	27,76	779.551.589.149,00	96,80
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	44.157.187.830,00	1,52	30.979.232.911,61	70,16
5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DHKI)	87.942.720.753,00	3,03	76.427.912.466,00	86,91
6	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	19.767.380.000,00	0,68	16.487.189.207,00	83,41
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPD)	18.273.227.372,00	0,63	15.305.651.690,00	83,76
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DSTKT)	18.318.642.888,00	0,63	12.169.309.125,00	66,43
9	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPPT)	25.575.819.128,49	0,88	15.201.727.389,00	59,44



10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP)	18.253.882.522,00	0,63	12.166.033.682,00	66,65
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Ksatpol PP)	23.847.680.999,00	0,82	15.335.492.262,00	64,31
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	13.966.580.035,31	0,48	10.727.029.998,12	76,80
13	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	17.395.494.710,00	0,60	13.977.708.221,00	80,35
14	Kepala Daerah & Wakil	1.375.619.485,00	0,05	1.197.192.233,00	87,03
15	Sekretariat Daerah	1.233.947.500.845,21	42,53	1.084.026.029.906,47	87,85
16	Sekretariat DPRD	79.898.864.055,18	2,75	63.272.915.265,00	79,19
17	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	45.984.993.136,00	1,58	17.832.661.685,71	38,78
18	Inspektorat	12.476.683.677,00	0,43	10.755.652.765,00	86,21
19	Badan Pengelola Perbatasan (BPP)	24.811.019.319,00	0,86	18.485.672.413,00	74,51
20	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DPKPP)	30.406.579.291,00	1,05	9.741.220.631,00	32,04
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)	14.295.333.628,00	0,49	9.741.220.631,00	68,14
22	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	25.040.180.529,93	0,86	22.422.340.100,00	89,55
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM)	23.369.589.656,00	0,81	17.427.071.750,00	74,57
24	Kantor Perwakilan Kaltara	22.036.372.657,00	0,76	18.368.529.624,00	83,36
25	Kantor Sekretariat Korpri	5.396.824.560,00	0,19	4.600.871.249,00	85,25
26	RSUD Tarakan	67.180.163.205,00	2,32	62.811.910.008,44	93,50
26	BLUD RSUD Tarakan	134.170.114.665,00	4,62	119.339.451.253,52	88,95
Jumlah		2.901.369.569.202,12	100,00	2.523.324.494.646,87	86,97

Sumber: Ekobang Setddaprov.Kaltara, 2016

Trend anggaran tahun 2017 naik dibanding anggaran tahun 2016 sebesar Rp.80.963.320.001,56 (2,79%) dari Rp.2.901.369.569.202,12 ditahun 2016 sehingga menjadi Rp.2.982.332.889.203,68 ditahun 2017. Kenaikan anggaran ditahun 2017 belum diikuti kenaikan realisasi keuangan tercatat per Oktober 2017 hanya 47,21% seyogya telah mencapai diatas 75% dari total anggaran tahun anggaran 2017. Realisasi keuangan tertinggi diserap oleh RSUD Tarakan yaitu 77,47% sedangkan terendah diserap oleh UPT BLUD RSUD Tarakan hanya sebesar 23,49% dari total anggaran sebesar Rp.2.982.332.889.203,68 (tabel 3.13). Dari total anggaran tersebut juga terlihat bahwa belanja tidak langsung sebesar 64,47% lebih tinggi dibanding belanja langsung yang hanya mencapai 36,28% dari total realisasi keuangan, namun perlu dicatat realisasi fisik belanja langsung lebih tinggi dari realisasi keuangan yaitu sebesar 41,31% sedangkan fisik belanja tidak langsung sama dengan realisasi keuangan sebesar 64,47%.



Tabel 3.13
Realisasi Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Per Oktober 2017

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi		
				Fisik (%)	Keuangan (RP)	Keuangan (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.127.069.896.296,80	37,79	64,47	678.702.554.443,07	64,47
	BELANJA LANGSUNG	1.855.262.992.906,88	62,21	41,31	729.303.508.722,33	36,28
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22.580.394.710,00	0,76	42,75	10.788.095.642,00	42,75
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.381.100.435,00	0,05	66,74	973.994.288,00	66,74
3	Sekretariat Daerah	232.978.975.615,45	7,81	77,70	113.425.492.141,92	49,22
4	Sekretariat DPRD (9 Biro)	67.037.427.292,00	2,25	51,54	38.555.536.169,00	51,54
5	Inspektorat	17.820.549.038,00	0,60	62,54	8.286.653.065,00	52,93
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.649.592.415,00	0,42	70,49	8.258.763.246,00	64,52
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.604.563.826,00	0,39	66,75	6.884.659.618,00	59,33
8	Badan Penghubung	18.873.405.857,00	0,63	48,30	8.017.855.769,00	42,75
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	32.818.601.344,00	1,10	55,64	14.502.693.845,64	44,19
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	590.524.690.993,00	19,80	63,46	369.378.314.888,75	63,46
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	50.820.704.788,00	1,70	47,32	30.852.404.562,00	47,32
12	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.727.578.210,00	0,83	37,09	9.245.630.417,00	37,09
13	UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan	4.547.485.000,00	0,15	60,33	2.743.312.010,00	60,33
14	UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan	4.637.260.000,00	0,16	61,87	2.868.866.320,00	61,87
15	UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan	3.719.300.000,00	0,12	68,81	2.559.320.0463,00	68,81
16	UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Malinau	3.883.677.175,00	0,13	41,99	1.599.560.102,00	41,19
17	UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung	3.002.470.000,00	0,10	68,25	2.049.175.301,00	68,25
18	Badan Kepegawaian Daerah	17.154.110.035,00	0,58	59,13	9.208.614.905,00	44,94
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.992.409.396,00	0,40	52,57	6.615.738.439,00	48,62
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	340.450.717.999,83	11,42	66,32	220.737.403.809,82	66,32
21	Dinas Kesehatan	45.018.287.271,00	1,51	57,26	12.226.749.770,11	28,84
22	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	121.338.351.015,00	4,07	77,47	93.998.490.694,66	77,47
23	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (BLUD)	116.668.457.521,00	3,91	23,49	27.399.783.171,50	23,49
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawaasan Pemukiman	889.970.506.362,28	29,84	26,64	230.060.305.115,00	24,65
25	Satuan Polisi Pamong Praja	17.616.065.440,00	0,59	51,98	9.157.069.589,00	51,98
26	Dinas Sosial	12.669.495.261,00	0,42	40,90	4.439.145.820,00	40,42



27	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	3.659.215.000,00	0,12	73,46	2.298.953.909,00	59,57
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.562.348.781,00	0,29	67,48	6.281.814.438,00	61,30
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.577.431.322,00	0,39	68,55	7.111.234.691,00	61,42
30	Dinas Lingkungan Hidup	12.122.095.000,80	0,41	62,65	7.120.772.184,00	61,49
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.887.691.832,00	0,33	59,39	5.181.374.015,00	54,30
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.442.570.842,00	0,38	63,91	6.477.922.240,50	56,61
33	Dinas Perhubungan	55.119.947.073,00	1,85	49,21	25.386.428.236,00	31,95
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.141.140.299,00	0,74	41,18	8.676.089.353,00	37,21
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.350.298.464,67	0,45	55,07	7.484.561.887,00	46,71
36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.462.720.393,00	0,28	57,88	5.130.127.960,00	57,88
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.582.720.393,00	0,25	59,09	4.521.710.570,00	58,12
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.368.387.674,65	1,12	68,99	20.115.922.235,00	58,05
39	Dinas Pariwisata	11.734.060.393,00	0,39	43,26	6.067.531.311,00	43,08
40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.489.410.313,00	0,82	72,57	13.019.107.396,00	53,16
41	Dinas Kehutanan	34.980.846.666,00	1,17	70,47	19.539.312.777,00	57,84
42	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.982.123.089,00	0,67	51,11	7.375.147.578,00	51,11
43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.383.704.668,00	0,58	54,15	11.384.423.222,50	51,89
JUMLAH		2.982.332.889.203,68	100,00		1.408.006.063.165,40	47,21

Sumber: Biro Pembangunan Setdaprov.Kaltara, Nopember 2017

Tabel 3.14 menginformasikan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2013-2016 cenderung naik jumlahnya akan tetapi persentasenya fluktuatif dan ada kecenderungan turun, hal ini mengindikasikan telah ada upaya perbaikan untuk meningkatkan belanja untuk kepentingan publik khususnya upaya untuk tercapainya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Tabel 3.14
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2013 s/d 2016

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(Rp)	
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	543,853,033,395	2,706,533,716,397	20.09
2	Tahun Anggaran 2015	394,322,747,248	1,977,210,782,212	19.94
3	Tahun Anggaran 2014	268,069,555,018	642,365,304,047	41.73
4	Tahun Anggran 2013	46,631,073,998	77,895,449,583	59.86

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016